

PENGARUSUTAMAAN GENDER-PENYELENGGARAAN

2024

PERDAKAB BELITUNG NO.12, LD 2024/NO.97, TLD NO. 97, 23 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NO. 12 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian Gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Daerah. Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di Daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan Gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.7 Tahun 1984, UU No.27 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.31 Tahun 2024, INPRES No.9 Tahun 2000, PERMENDAGRI No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI UU No.67 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengarusutamaan Gender dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengarusutamaan Gender yang dimaksud adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di daerah. Diatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perencanaan Pengarusutamaan Gender, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, peran serta masyarakat, pembinaan, penghargaan, dan pembiayaan

- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 November 2024 dan ditetapkan tanggal 27 November 2024
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan : 6 hlm